

Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Asichul In'am, Toha Ma'sum

STAI Darussalam Nganjuk

Email: asrofzahirul@gmail.com, mahsuntoha81@gmail.com

Abstract

Education financing is a crucial aspect of any educational institution, as every activity or program requires funding. Without proper financing, operational activities within educational institutions cannot run effectively. Education financing can be considered good if the income and expenditure are balanced and align with the pre-established plans. This study aims to analyze the issues surrounding education financing in Indonesia. Although education funding in Indonesia has increased from around 10 percent of the national budget (APBN) to 20 percent, the financing has not yet reached its full potential. The researcher utilized a library research method, gathering data from various sources such as books, articles, proceedings, and environmental analyses. The findings of this study reveal that education financing in Indonesia includes direct and indirect financing, private financing, social costs, and monetary funding. The challenges faced in education financing in Indonesia include unequal access to education, low quality and relevance of education, and issues with education standards. The financing system in Indonesia encompasses investment financing, operational financing, and personal financing. Based on the findings and analysis, it is hoped that education financing in Indonesia will improve, particularly in enhancing teacher welfare, with special attention to honorary teachers, as well as increasing the allocation of operational aid funds to ensure better education in Indonesia.

Keywords: *financing, education, islamic educational institutions*

Abstrak

Pembiayaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting di suatu lembaga pendidikan, setiap kegiatan atau program pasti membutuhkan pembiayaan, tanpa adanya pembiayaan di lembaga pendidikan kegiatan operasional tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembiayaan pendidikan dapat dikatakan baik jika antara pendapatan dan pengeluaran harus imbang serta sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia, meskipun pembiayaan yang berada di Indonesia sudah meningkat yang semula anggaran APBN berkisar 10 persen sekarang naik menjadi 20 persen, akan tetapi pembiayaan pendidikan belum bias maksimal. Peneliti menggunakan metode Kepustakaan, yang mana pengalian data didapat dari berbagai sumber literatur seperti Buku, artikel, prosedur dan analisis lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pembiayaan pendidikan yang berada di Indonesia meliputi pembiayaan Langsung dan tidak langsung, pembiayaan pribadi dan biaya sosial serta pembiayaan berupa uang. Permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia meliputi Pemerataan Pendidikan, rendahnya mutu dan relevansi serta kualitas pendidikan. Sistem pembiayaan di Indonesia meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan operasional dan pembiayaan personal. dari pernyataan dan hasil analisis diharapkan pembiayaan pendidikan di Indonesia lebih ditingkatkan terutama pada

kesejahteraan guru, lebih dikhkususkan lagi bagi guru Honorer serta alokasi dana bantuan operasional ditambah agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *pembiayaan, pendidikan, lembaga pendidikan islam*

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek kunci dalam memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata untuk seluruh warga negara. Pendidikan yang berkualitas memiliki dampak yang sangat besar, baik dalam meningkatkan kualitas hidup individu maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial suatu negara. Meskipun penting, pembiayaan pendidikan di Indonesia telah menjadi tantangan yang kompleks selama bertahun-tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti diversitas geografis, jumlah penduduk yang besar, serta perbedaan ekonomi antar wilayah telah menjadikan sistem pendidikan Indonesia sebagai sistem yang memerlukan perhatian khusus.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan. Langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah mencakup berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta berbagai program beasiswa baik beasiswa dari pusat maupun biasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah. Meskipun demikian, masih ada tantangan serius terkait dengan pembiayaan pendidikan yang perlu diatasi.

Salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah adalah ketidakmerataan dalam akses dan kualitas pendidikan. Terdapat perbedaan signifikan dalam pembiayaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Dalam hal ini merupakan masalah krusial yang perlu diatasi agar setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, isu-isu seperti keberlanjutan pembiayaan, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dari perdebatan seputar pendidikan di Indonesia.

Pemerintah, bersama dengan mitra-mitra internasional, terus berupaya untuk mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pembiayaan pendidikan. Pendahuluan tersebut mencerminkan pentingnya pembiayaan pendidikan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia. Artinya, peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan pendidikan sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkesinambungan. Terus ada tantangan dan perubahan yang perlu dihadapi, namun dengan kerja sama yang kuat dan tekad untuk meningkatkan sistem pembiayaan pendidikan, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Fokus penelitian ini membahas tentang Analisis Pembiayaan pendidikan di Indonesia meliputi, Konsep dasar pembiayaan pendidikan di Indonesia, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Indonesia, system pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pengetahuan di bidang penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya membangun kerangka konseptual yang koheren dengan cara mengintegrasikan berbagai sumber yang relevan dan terpercaya.

Pencarian literatur dalam penelitian ini dimulai dengan menyusun daftar kata kunci yang relevan, seperti "pembiayaan pendidikan", "permasalahan pembiayaan pendidikan", "system pembiayaan pendidikan di indonesia", dan kata kunci terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan karena dianggap lebih efisien dan efektif dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, tanpa harus melakukan penelitian lapangan yang memakan waktu dan biaya. Berdasarkan kajian mendalam terhadap berbagai literatur yang kredibel, penelitian ini berhasil mengungkap secara komprehensif peranan teknologi blockchain dalam pengelolaan pendidikan Islam, termasuk manfaat dan potensinya dalam menjawab tantangan zaman.

Pembahasan

1. Konsep Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Secara asal-usul kata, pendidikan berarti proses mengembangkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan potensi individu.¹ Pendidikan merupakan fondasi yang kuat untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Dalam UUD 1945 Pasal 31 menjelaskan jika setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi serta pemerintah menuturkan bahwa setiap warga Indonesia wajib belajar 9 tahun, serta kewajiban dan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional. Setelah adanya amandemen keempat pada UUSPN Nomor 20/2003, Kewajiban konstitusional untuk mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana tercermin dalam visi Kementerian Pendidikan yang menekankan pada;²

- a. Kualitas layanan pendidikan yang tersedia
- b. Kemudahan akses terhadap layanan Pendidikan
- c. Layanan pendidikan yang unggul dan sesuai kebutuhan
- d. Kesetaraan dalam akses dan kualitas Pendidikan
- e. Jaminan akses dan kualitas layanan Pendidikan

Dengan adanya misi tersebut maka pendidikan mendapat jaminan pengalokasian anggaran pasti untuk diaplikasikan dalam operasional pendidikan.

Secara bahasa, biaya dapat diatik sebagai pengeluaran. Secara teori, proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar karena skalanya yang luas.³ Mulyadi

¹ Agnes, *Untuk Apa Ku Mengenal Pendidikan?*, (Jakarta: Guepedia, 2020), 21.

² Undang Ruslan Wahyudi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 72.

³ Ara Hidayat dan A. Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2022), 34.

berpendapat, konsep biaya diklasifikasikan menjadi dua konsep yaitu dalam artian sempit dan luas.⁴ Secara terbatas, biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi guna mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan. Sedangkan dalam arti luas ialah pengeluaran yang berbentuk uang yang digunakan agar mendapat fasilitas atau biaya operasional guna meraih capaian tertentu. Simamora mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan sumber daya moneter yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan bagi organisasi.⁵

Pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya mampu diklasifikasikan menjadi empat unsur:

- a. Pengeluaran dalam segi ekonomi
- b. Satuan berbentuk uang atau sesuatu yang dapat ditukar
- c. Memperoleh fasilitas atau kebutuhan operasional
- d. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam terminologi administrasi keuangan, mengklasifikasikan keuangan bidang pendidikan menjadi dua macam yaitu biaya (*cost*) dan pembelanjaan (*expenditure*). Secara konseptual, biaya merupakan estimasi nilai moneter yang diperlukan untuk melaksanakan suatu aktivitas, sedangkan pembelanjaan adalah tindakan aktual pengalokasian dana untuk aktivitas tersebut. Sementara pembelanjaan merujuk pada nilai aktual dana yang dialokasikan untuk membiayai suatu unit kegiatan.⁶ Kata biaya disini jika diimplementasikan terhadap sebuah proses pada pendidikan maka mendapat imbuhan *pe* dan *an* yang menurut kaidah kebahasaan Indonesia menjadikan kata biaya berubah menjadi kata pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah dana yang dihasilkan melalui beberapa sumber pembiayaan dan disalurkan untuk berbagai kegiatan dan keperluan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup honor pendidik dan tenaga kependidikan, serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki fasilitas belajar, dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler, serta pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama.⁷ Pembiayaan pendidikan sangat erat dengan bagaimana lembaga mencari dana dari berbagai sumber seperti pemerintah, masyarakat, donator, wali murid dan usaha lembaga itu, bagaimana menyalurkan dana melalui rencana kegiatan dan angaran madrasah atau sekolah yang sudah disepakati oleh kepala madrasah dan komite madrasah melalui rapat terbuka bersama segenap pimpinan sekolah, komite, guru sebagian siswa, meningkatkan dana operasional dan mempersiapkannya untuk kebutuhan di masa depan.⁸

Fungsi dari anggaran pendidikan menurut Rencana Departemen Pendidikan Nasional yaitu;⁹ memperhatikan masyarakat kurang mampu sehingga dapat

⁴ Undang Ruslan Wahyudi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.....74.

⁵ Dwinta Ayuningtyas, "Evaluasi Penerapan Biaya Standar Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi Pada Harian Tribun Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.4 (2013), 1912.

⁶ Ahmad Munir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam", *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2013), 225.

⁷ Ibid.,225.

⁸ Ibid.,228.

⁹ Ara Hidayat dan A. Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*.... 37.

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pengelola lembaga pendidikan dapat mengelola pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang sudah disepakati oleh pimpinan dan komite sekolah, memberikan imbalan serta sanksi terhadap keperluan serta menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan berupa peningkatan profesional pendidik dan peningkatan mutu peserta didik melalui berbagai kegiatan dan program yang diselenggarakan lembaga.

Menurut Supriyadi, ada tiga jenis anggaran pendidikan, yaitu;¹⁰

a. Biaya langsung dan tidak langsung

Biaya langsung merupakan anggaran yang dikeluarkan lembaga pendidikan guna seluruh keperluan yang berada di sekolah baik berupa program, kegiatan maupun sarana dan prasarana. Kegiatan yang dimaksud ialah pelaksanaan belajar mengajar, penerimaan siswa baru, masa orientasi siswa, ekstra kurikuler pembelian ATK dan kebutuhan kantor lainnya. Program yang dimaksud ialah segala bentuk aktifitas yang disepakati untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dan meningkatkan keilmuan peserta didik. Sarpras yang dimaksud ialah segela bentuk sarana dan prasarana yang belum ada atau perbaikan/renovasi. Biaya tidak langsung merupakan sejumlah anggaran yang ditanggung oleh siswa guna kebutuhan sendiri sehingga dapat menunjang pelaksanaan pendidikan seperti biaya hidup, biaya jajan, trasportasi, kebutuhan siswa berupa Tas, sepeda, sepatu dan segala bentuk kebutuhan untuk menunjang pendidikan.

b. Biaya pribadi dan biaya sosial

Biaya pribadi merujuk pada pengeluaran langsung keluarga yang dialokasikan untuk membiayai pendidikan anggota keluarganya, sedangkan biaya sosial yaitu bentuk pengeluaran yang dibiayai oleh masyarakat yakni donator atau hibah untuk kebutuhan pendidikan, baik melalui iuran langsung maupun tidak langsung, masyarakat berkontribusi dalam upaya mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas.

c. Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*)

Biaya moneter merujuk pada total pengeluaran finansial, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan oleh individu atau masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan. Bisa diartikan jika biaya moneter seperti uang sekolah dan biaya buku adalah pengorbanan yang nyata, sedangkan biaya non-moneter seperti waktu yang digunakan untuk belajar dan kesempatan yang hilang untuk bersenang-senang adalah pengorbanan yang tidak kalah penting. Objek biaya pendidikan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan dan program pendidikan. Objek biaya dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis: produk atau kelompok produk yang saling terkait, jasa yang ditawarkan, departemen-departemen dalam organisasi (seperti departemen teknik atau sumber daya manusia), dan proyek-proyek khusus (misalnya proyek penelitian, promosi pemasaran, atau proyek layanan masyarakat).

¹⁰ Maryam B. Gainau.dkk, *Problematika Pendidikan Di Indonesia*, (Sleman: PT Kanisius, 2021) 33-34.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Konsep biaya pendidikan merupakan representasi abstrak dari observasi empiris terhadap besaran dana yang diperlukan untuk Pendidikan.

2. Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, linguistik, dan agama. Kekayaan ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang dinamis, terlihat dari kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sistem politik, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap manusia dan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, di antaranya;

a. Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan aktivitas pembelajaran yang terstruktur, dimulai dari pendidikan dasar, dilanjutkan ke pendidikan menengah, dan diakhiri dengan pendidikan tinggi. Proses tersebut ditujukan guna menyediakan keilmuan, pengingkatan skill, serta aspek-aspek yang dibutuhkan bagi peserta didik.

b. Pendidikan informal

Pendidikan informal ialah aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di luar institusi pendidikan formal, melalui interaksi dengan keluarga, lingkungan, dan pengalaman sehari-hari. Proses ini dilakukan secara mandiri dan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Axin berpendapat bahwa meskipun tidak disengaja, pendidikan informal dapat direncanakan dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Pendidikan ini dilaksanakan tanpa menyesuaikan prosedur dari pemerintah akan tetapi pendidikan ini merupakan salah satu tempat yang sangat membantu masyarakat untuk menimba dan memperdalam ilmu pengetahuan terutama pengetahuan Agama.¹¹

c. Pendidikan non-formal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan definisi bahwa pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang berada di luar sistem sekolah, namun dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang seperti halnya pendidikan formal. Marzuki berpendapat bahwa pendidikan non formal merupakan pendidikan yang tidak terstruktur tidak direncanakan sebagaimana pendidikan formal akan tetapi pendidikan ini sangat membatu dan menunjang masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih.¹² Pendidikan non-formal bisa diakses dengan beragam cara, seperti berinteraksi dengan komunitas yang memiliki minat serupa, membangun jaringan dengan orang-orang yang relevan, serta melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang menuntut pengembangan keterampilan baru.

Pendidikan di Indonesia pastinya tidak akan luput dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia yaitu, sebagai berikut:

¹¹ Raudatus Syaadah.dkk, "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal", *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2022), 128.

¹² Ibid.,127.

a. Pemerataan Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan adalah tantangan untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional.¹³ Nurhuda menuturkan bahwa permasalahan pemerataan pendidikan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga peraturan atau kebijakan tidak sepenuhnya tersampaikan, bahkan hingga ke desa-desa yang paling jauh dari pusat kota. Kondisi ini mengakibatkan terputusnya saluran komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga lembaga pendidikan di daerah terpencil mengalami kendala dalam menjalankan fungsi pendidikannya. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di daerah terpencil pun menjadi tidak optimal.

Faktor yang menyebabkan permasalahan pendidikan ialah;¹⁴

- 1) Perekonominian
- 2) Terbatasnya akses teknologi dan sarana prasarana
- 3) Pengarahan terhadap pembangunan lebih unggul dan terarah didaerah perkotaan dibanding dengan daerah pedesaan.

b. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Masalah yang terjadi pada mutu dan relevansi pendidikan berarti suatu hal yang harus dipecahkan atau diselesaikan mengenai persoalan kualitas dan kesesuaian pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah mutu pendidikan yaitu, sebagai berikut;¹⁵

1) Kurangnya guru berkualitas

Dengan kemajuan teknologi di era globalisasi ini, justru dunia pendidikan mengalami kemerosotan. Mengenai dengan hal itu, banyak ditemukan guru yang tidak profesional dalam mengajar, guru yang tidak memiliki dedikasi dan etos kerja tinggi, ia hanya memenuhi tugas mengajar tanpa mendidik sehingga hasil yang didapat hanya bersifat kognitif dan tidak memperhatikan segi afektif.

Secara garis besar, seorang guru setidaknya harus memiliki kemampuan;¹⁶

- a) Penguasaan materi atau bahan ajar
- b) Perencanaan program proses belajar-mengajar
- c) Kemampuan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar
- d) Kemampuan penggunaan media dan sumber pelajaran
- e) Kemampuan evaluasi dan penilaian
- f) Kemampuan penyuluhan dan bimbingan.

2) Rendahnya kesejahteraan guru

¹³ Yosef Patandung dan Selvi Panggu, "Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional", Jurnal Sinestesia, Vol. 12, No. 2, (2022), 796.

¹⁴ Ibid.,797.

¹⁵ Maryam B. Gainau.dkk, *Problematika Pendidikan Di Indonesia.....8.*

¹⁶ Ibid.,15.

Kesejahteraan guru yang rendah merupakan salah satu penyebab utama menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia.¹⁷ Kesejahteraan ada dua, yaitu kesejahteraan berupa material yakni gaji guru yang kurang sehingga guru kurang focus untuk melaksanakan pembelajaran sebab waktu bagi guru terbelah, disamping memikirkan siswa juga memikirkan ekonomi keluarga. dan yang kedua non material. Kesejahteraan material bisa berupa uang maupun benda berharga, sementara kesejahteraan non material ialah segala keperluan yang kaitannya dengan rohani yang tercukupi seperti kasih sayang, damai, ketenangan, keamanan dan lainnya.¹⁸

Gaji yang masih rendah menjadi indikator utama rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Gaji guru di Indonesia terutama guru honorer terbilang sangat memprihatinkan, melihat fenomena yang ada gaji guru yang diterima berkisar Rp. 500.000 samapai dengan 1 Juta per bulan itupun bagi guru yang sudah lama mengabdi, bagi guru yang masih relative baru gaji yang diterima berkisar 300 ribu samapi 500 ribu. Itu pun ketika guru izin akan dipotong oleh lembaga. Bahkan lembaga yang kekurangan sumber pembiayaan terpaksa belum bisa memberikan honornya dikarenakan bantuan operasional pendidikan belum turun, sehingga honor akan diberikan saat anggaran dari pemerintah sudah turun. Melihat fenomena tersebut kata sejahtera untuk guru terutama guru honorer masih jauh dari apa yang diinginkan. Selanjutnya, jika berdasarkan teori keadilan, motivasi kerja yang tinggi dapat dicapai ketika terdapat persepsi yang adil antara kontribusi individu dengan imbalan yang diterima.

Terdapat kasus di mana beberapa guru tidak memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi pendidik, melainkan ter dorong oleh faktor eksternal seperti sulitnya mencari pekerjaan lain. Hal ini tentu saja berdampak buruk pada kualitas pendidikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi guru honorer yang berada di Indonesia bukan hanya gaji yang rendah akan tetapi peningkatan profesionalisme guru masih kategori minim. Semua itu disebabkan kurangnya anggaran dan pengelolaan yang kurang maksimal.

3) Perubahan Kurikulum

Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi kurikulum pendidikan sebanyak 11 kali sejak masa pasca kemerdekaan hingga tahun 2021-2022, di antaranya:

- a) Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)
- b) Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952)
- c) Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964)
- d) Kurikulum 1968
- e) Kurikulum 1975
- f) Kurikulum 1984

¹⁷ M. Shiddiq al-Jawi, "Pendidikan di Indonesia : Masalah dan Solusinya", *House of Khilafah*, (tt: Redaksi, 2006).

¹⁸ Nabila Rahma Aulia.dkk, "Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan", *BASA*, Vol. 3, No.1, (2023), 27.

- g) Kurikulum 1994 & Suplemen kurikulum 1999
 - h) Kurikulum berbasis kompetensi 2004 (KBK)
 - i) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP)
 - j) Kurikulum 2013 (K-13)
 - k) Kurikulum 2021 (Kurikulum Merdeka)
 - Dampak negatif dari seringnya pergantian kurikulum ialah;
 - a) Akibat sejumlah faktor penghambat, target pendidikan di tahap awal tidak dapat terpenuhi disebabkan tidak terlaksanakan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang dianggap sudah baik.
 - b) Fasilitas yang kurang memadai terhadap saran dan prasarana yang di beberapa daerah tertentu.
 - c) Sosialisasi yang dilaksanakan tentang kurikulum baru membutuhkan waktu yang relative lama. Terkadang sosialisasi belum selesai atau penerapan kurikulum di bawah belum terlaksana ketika ganti pemerintahan kurikulum akan dirubah. Sehingga kurikulum yang diinginkan pemerintah belum bisa tercapai.
 - d) Menurunnya prestasi siswa disebabkan siswa yang susah menyesuaikan diri terhadap sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru.
- c. Kualitas Pendidikan

Rendahnya kualitas pendidikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pendidikan yang dilakukan dengan norma dan standar yang berlaku, sehingga berdampak pada kualitas lulusan. Masalah kualitas pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek utama: prestasi akademik, lingkungan belajar, dan dampak ekonomi.

Persepsi masyarakat secara luas mengenai pendidikan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yang mana masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu hanya sebagai alat untuk mencari pangkat, jabatan mendapatkan gelar dan gengsi. Ketika menuntut ilmu tidak lagi dianggap sebagai kewajiban pribadi, maka motivasi belajar akan menurun, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

3. Sistem Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Struktur pembiayaan pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen, yaitu;¹⁹

- a. Biaya investasi merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, serta pembentukan modal tetap lembaga pendidikan.
- b. Biaya operasional merupakan pengeluaran rutin yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga pendidikan, meliputi gaji pegawai, biaya langsung (bahan habis pakai), dan biaya tidak langsung (jasa, utilitas)
- c. Biaya personal merupakan pengeluaran yang ditanggung oleh peserta didik atau wali untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sehari-hari, termasuk biaya perlengkapan sekolah, uang saku, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap mekanisme pembiayaan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat

¹⁹ Undang Ruslan Wahyudi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.....96.

disparitas yang signifikan antara biaya pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia.²⁰

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan landasan hukum yang mengatur secara menyeluruh tentang sistem pendidikan nasional, meliputi tujuan, prinsip, penyelenggaraan, peserta didik, serta berbagai aspek lainnya yang terkait dengan pendidikan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur berbagai aspek penting lainnya dalam sistem pendidikan nasional, seperti standar mutu pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, evaluasi, akreditasi, pendirian satuan pendidikan, serta pengawasan dan sanksi.²¹

Ketentuan baru dalam Pasal 31 UUD 1945 menuntut alokasi anggaran yang lebih besar untuk memenuhi hak warga negara dalam bidang pendidikan. Selain untuk gaji guru dan biaya sekolah, setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan. Dana pendidikan sebesar 213 triliun rupiah yang berasal dari APBN dan APBD untuk membiayai gaji guru dan dosen harus digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan.²²

Pasal 62 Bab IX secara eksplisit menguraikan standar pembiayaan yang berlaku, yaitu;²³

- a. Struktur pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi sebagai modal awal, biaya operasi untuk kegiatan sehari-hari, dan biaya personal yang terkait dengan individu.
- b. Biaya investasi yang dimaksud dalam ayat sebelumnya meliputi pengadaan sarana dan prasarana fisik, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan modal kerja tetap.
- c. Biaya personal meliputi segala jenis pengeluaran yang harus ditanggung siswa, mulai dari pembelian buku dan alat tulis hingga biaya transportasi untuk pergi ke sekolah.
- d. Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi belanja rutin untuk:
 - 1) Total penghasilan yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk tunjangan.
 - 2) Material yang bersifat konsumtif.
 - 3) Biaya operasional tidak langsung yang meliputi utilitas, pemeliharaan, dan biaya-biaya operasional lainnya.

Penutup

Proses implementasi pembiayaan pendidikan harus memperhatikan kegiatan yang dibiayai serta pelaksanaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pembiayaan pendidikan sendiri terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

²⁰ Nopriani Rara & Trivena, "Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi, Seberapa Besar Dampaknya?", *Jurnal KIP Vol. X No. 3 November 2021- Februari 2022*, 54.

²¹ Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2003).

²² Nopriani Rara & Trivena, "Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi, Seberapa Besar Dampaknya?"55.

²³ Undang Ruslan Wahyudi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*..... 83.

Permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia menjadi topik yang sering diperbincangkan. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, banyak yang belum mencukupi, apalagi untuk kebutuhan pendidikan yang setiap tahun semakin meningkat biayanya. Tidak dapat disangkal, pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang besar. Masalah ini menjadi kendala bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas yang membutuhkan dukungan lebih dalam melanjutkan pendidikan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk bantuan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, masih banyak anak yang harus putus sekolah karena alasan tidak memiliki biaya. Melihat kompleksitas permasalahan ini, beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, misalnya dengan memberikan pendapatan tetap sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dalam memenuhi biaya pendidikan. Selain itu, pemerintah perlu terus mengembangkan program-program pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Agnes, *Untuk Apa Ku Mengenal Pendidikan?*, (Jakarta: Guepedia, 2020).
- Al-Jawi, M. Shiddiq. "Pendidikan di Indonesia : Masalah Dan Solusinya", *House of Khilafah*, (tt: Redaksi, 2006).
- Aulia, Nabila Rahma dkk., "Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan". *BASA*. Vol. 3, No.1, (2023).
- Ayuningtyas, "Evaluasi Penerapan Biaya Standar Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi Pada Harian Tribun Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.4 (2013).
- Gainau, Maryam B.dkk., *Problematika Pendidikan Di Indonesia*, (Sleman: PT Kanisius, 2021) 33-34.
- Hidayat. Ara dan A. Rusdiana. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2022.
- Munir, Ahmad. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam". *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2. (Desember 2013).
- Patandung, Yosef dan Selvi Panggu. "Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional", *Jurnal Sinestesia*, Vol. 12, No. 2, (2022).
- Rara, Nopriani & Trivena. "Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi, Seberapa Besar Dampaknya?", *Jurnal KIP* Vol. X No. 3 November 2021- Februari 2022.
- Raudatus Syaadah.dkk, "Pendidikan Formal, Pendidikan Non.Formal dan Pendidikan Informal", *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2003).

Wahyudi, Undang Ruslan. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas)*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.